

PERANAN BUDAYA DALAM PEMBANGUNAN

Oleh: Tenas Effendy

I. PENDAHULUAN

Hakikatnya, pembangunan bertujuan untuk *meningkatkan kecerdasan, taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat* dalam arti yang seluas-luasnya, atau sering disebut untuk: "*membangun manusia yang sejahtera lahiriah dan batiniahnya*" atau disebut: "*membangun manusia seutuhnya*". Untuk mewujudkan tujuan dimaksud, tentulah diperlukan beragam faktor pendukung, sehingga pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan dan tepat guna. Salah satu faktor pendukung utamanya adalah kebudayaan.

Kenyataan menunjukkan, bahwa pembangunan yang dilakukan dimasa silam, nyaris tidak merujuk kepada kebudayaan, bahkan kebudayaan hanya dijadikan salah satu sasaran pembangunan. Padahal, *kebudayaan semestinya tidak hanya dijadikan sasaran pembangunan tetapi juga dijadikan landasan pembangunan, sehingga pembangunan itu benar-benar pembangunan yang mencerminkan nilai-nilai budaya bangsa* dan patut disebut sebagai "*pembangunan yang berbudaya*". Karena selama ini pembangunan tidak mengacu kepada budaya,

akibatnya, banyak pembangunan yang nyaris tidak tepat guna dan tidak tepat sasaran bahkan mendekati "*kemubaziran*". Itulah sebabnya gagasan untuk menjadikan kebudayaan sebagai salah satu landasan dan pendukung pembangunan patut dan layak didukung oleh semua pihak.

Kita menyadari, bahwa bangsa Indonesia umumnya, masyarakat Melayu Riau khususnya (termasuk masyarakat di Kabupaten Pelalawan) adalah masyarakat yang berbudaya. Kebudayaan mereka adalah kebudayaan Melayu yang terbuka, sehingga menjadi kebudayaan yang majemuk di dalam masyarakatnya yang juga majemuk. Landasan utama budaya Melayu yang berpunca kepada ajaran Islam, menyebabkan "*kemelayuan*" seseorang tidak lagi semata-mata mengacu kepada kesukuan atau etnis, tetapi ditandai oleh tiga pilar, yakni: "*beragama Islam, beradat (budaya) Melayu dan berbahasa Melayu*". Acuan inilah yang selama berabad-abad menjadi landasan dan acuan berfikir orang Melayu, sehingga mereka berkembang dalam keterbukaan dan kemajemukannya. Keterbukaan itu pula yang menyebabkan budaya Melayu semakin kaya, dinamis dan mampu mengikuti perkembangan zaman dan mampu pula mengekalkan asas-asas hakiki sebagai "*jati diri*" orang Melayu di kawasan ini.

Di dalam keterbukaan dan kemajemukannya, budaya Melayu menjadi budaya yang dinamis, mampu menyerap nilai-nilai positif budaya luar, dan mampu pula meredam masuknya nilai-nilai yang negatif, sehingga budaya ini semakin berkembang dan kaya dengan beragam nilai luhurnya. Karenanya, *menjadikan kebudayaan daerah ini sebagai salah*

satu landasan pembangunan, menjadikannya sebagai acuan dan mampu mewarnai pembangunan, amatlah penting dan bermanfaat.

II. LATAR BELAKANG KEBUDAYAAN MELAYU RIAU

Sejarah Riau mencatat, bahwa sukubangsa pertama yang jmenidiami nusantara ini adalah sukubangsa *Wedoide*. Mereka hidup mengembara, dan semata-mata bergantung kepada alam. Sisa-sisa sukubangsa ini, oleh sebagian ahlinya dikatakan , di Riau ialah suku “*Utan*” (“*Orang Laut*”) dan sebagian mengatakan termasuk suku “*Sakai*”), yang disejajarkan dengan suku “*Tokea*” dan “*Toala*” di Sulawesi, dan suku “*Senoi*” di Malaysia. Mereka dikenal dengan sukubangsa yang memakai artifak berupa “*kapak genggam*” yang lazim dipakai dalam kehidupan “*Zaman Batu Pertengahan*” (*mesolithicum*).

Sekitar tahun 2500 – 1500 SM datang lagi suku bangsa “*Proto Melayu*” (*Melayu Tua*) dari daratan Asia, menyebar ke Semenanjung Tanah Melayu (Malaysia) dan sebagian sampai ke Nusantara (Indonesia) bagian barat, termasuk di Riau. Sisa-sisa suku bangsa ini ialah: suku “*Talang Mamak*” di kawasan Inderagiri, suku “*Talang*” (*Petalangan*) di kawasan sungai Kampar, suku “*Sakai*” di kawasan sungai Siak, suku “*Bonai*” dan “*Kubu*” di kawasan sungai Rokan, dan suku “*Kuala*” (sebagian “*Orang Laut*”) di perairan Selat Melaka. Sukubangsa ini dikenal sebagai pemilik kebudayaan “*Kapak Bersegi Empat*” yang lazim dipergunakan dalam “*Zaman Batu Baru*” (*neolithicum*).

Sekitar tahun 300-150 SM datang pula suku bangsa *“Deutro Melayu” (Melayu Muda)*. Peninggalan budaya suku bangsa ini pernah ditemui di desa *“Kuwing”* Kecamatan Bangkinang, Kampar, berupa arca kecil dari perunggu, manik-manik dan gelang perunggu. Sedangkan di Lubuk Ambacang (Inderagiri Hulu/Kuantan Singingi) ditemui arca sejenis, dan di Rokan ditemukan pula arca batu. Suku bangsa *“Deutro Melayu”* ini kemudian mendesak suku *“Proto Melayu”* ke pedalaman, dan sebagian bercampur dengannya. Dari percampuran inilah lambat laun melahirkan *“Orang Melayu Riau”*, yang dalam abad-abad berikutnya bercampur baur pula dengan berbagai suku bangsa lainnya di Nusantara ini sehingga melahirkan *“Orang Melayu Riau” yang sangat majemuk dengan kebudayaannya yang majemuk pula.*

Walaupun sumber tertulis nyaris tidak menyebutkan adanya kerajaan kuno di Riau, tidaklah menutup kemungkinan adanya kerajaan dimaksud. Apalagi letak geografis daerah Riau sangat strategis dalam arus lintas niaga di Selat Melaka, adanya ribuan pulau dan sungai-sungai besar, serta kekayaan alamnya yang berlimpah. Faktor-faktor ini tentulah dapat mendukung keberadaan kerajaan kuno dimaksud. Dari sisi lain, kepaiwaan Orang Melayu masa silam di lautan, menyebabkan mereka mampu mengarungi samudera luas sampai ke Madagaskar dan sebagainya. Karenanya, para sejarawan dan pakar antropologi dan budaya mengatakan, bahwa *“kebudayaan Melayu adalah kebudayaan bahari”*. Bahkan, D.G.E.Hall mengatakan: *“Melayu Sumateralah yang memulakan perhubungan dagang jalan laut ke negeri Cina, dan bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa ahli-ahli perkapalan Melayu telah memainkan*

peranan yang tidak kurang pentingnya seperti orang India dalam perdagangan Asia Tenggara dengan India dan Ceylon” . Sedangkan Dr. Walters menamakan *pantai Sumatera sebagai “pantai emas” zaman awal perdagangan Indonesia, dan dari sinilah pelayaran menyeberangi Laut Cina Selatan mula-mula dirintis.*

Karena kurangnya sumber tertulis mengenai kerajaan kuno di Riau, hasil seminar sejarah Riau (1974) hanya menyebutkan sebuah kerajaan kuno saja, yakni **“Kerajaan Katangka”** yang diperkirakan berpusat di kawasan Muara Takus dan Batu Bersurat (Kec. XIII Koto Kampar). Kerajaan inilah yang dianggap sebagai kerajaan pra Sriwijaya di Riau. Dan setelah Sriwijaya berdiri, kerajaan ini lebur menjadi kerajaan Sriwijaya yang pusatnya di **Muara Takus**, yang sisa-sisa peninggalannya masih ada berupa **komplek percandian Muara Takus**.

Dalam masa kerajaan Sriwijaya berkuasa (abad ke-7 sampai ke-14 M), daerah Riau sekarang seluruhnya berada di bawah Sriwijaya. Menjelang kerajaan Sriwijaya berakhir di Riau muncul kerajaan-kerajaan Melayu Riau yang bermula dari kerajaan **“Bintan”** dan **“Temasik”** di perairan Selat Melaka, kerajaan **“Kandis”** dan **“Keritang”** di Inderagiri, kerajaan **“Pekantua Kampar”** (yang kemudian menjadi kerajaan **Pelalawan**) dan **“Gunung Sailan”** di Kampar, kerajaan **“Gasib”** di Siak, kerajaan **“Pekaitan”** di Rokan. Sedangkan di Semenanjung Tanah Melayu muncul kerajaan **“Melaka”**. Setelah Sriwijaya benar-benar berakhir, maka kerajaan-kerajaan Melayu di Riau semakin berkembang, dan menjelang abad ke 18 lahir kerajaan **“Siak Sri Inderapura”**, kerajaan **“Rambah”** dan

“*Rokan IV Koto*”, kerajaan “*Riau Lingga*”, kerajaan “*Inderagiri*” dan sebagainya.

Pada masa kemunduran Sriwijaya, masuklah pengaruh Singosari dan kemudian semakin kokoh dizaman Mojopahit. Kerajaan-kerajaan di Riau bernaung di bawah Mojopahit, sampai pengaruh itu kemudian diambil alih oleh kerajaan Melaka yang menjadi pusat imperium Melayu. Sejak itulah seluruh kerajaan di Riau bernaung di bawah Melaka, sampai kerajaan itu berakhir 1511 M ketika Melaka dikalahkan oleh Portugis.

Sultan Mahmudsyah I, sultan Melaka terakhir, dalam usahanya melawan Portugis berundur ke Muar, kemudian ke “*Kota Kara*” dan “*Kopak*” di Bintan. Kemudian terus masuk ke “*Pekantua Kampar*” dan dinobatkan sebagai sultan di sana (1526 M) sampai beliau wafat (1528 M) dan digelar “*Marhum Kampar*”, dimakamkan di Pekantua (Desa Tolam, Kecamatan Bunut/Pelalawan). Puteranya **Raja Ali** dinobatkan menjadi sultan Pekantua, digelar “**Sultan Alauddin Riayat Syah II**”, tetapi tak lama kemudian beliau kembali ke Tanah Semenanjung, membangun kerajaan Johor dan menjadi Sultan Johor. Sejak itu Johor memegang teraju sebagai “*pewaris*” Melaka. Namun Johor menghadapi beragam tantangan, bermula dari Portugis, kemudian dari Belanda, Inggeris, Aceh dan Jambi. Karenanya Johor menjadi lemah. Akibatnya, kerajaan-kerajaan Melayu di Riau mulai melepaskan dirinya dari Johor.

Tahun 1669 M kerajaan Inderagiri memisahkan dirinya dari Johor, dan tahun 1721 M kerajaan Siak Sri Inderapura pula melepaskan dirinya dari Johor. ***Puncak pemutusan hubungan kerajaan Melayu di Riau dengan di Tanah Semenanjung terjadi sebagai akibat Traktat London***

yang dilakukan antara Inggeris dan Belanda tanggal 17 Maret 1824 M, yang memisahkan Melayu Riau dengan Melayu Tanah Semenanjung. Sejak itu, kerajaan-kerajaan Melayu di Riau berdiri sendiri, dan dalam abad-abad berikutnya satu persatu dikuasai Belanda, sedangkan kerajaan-kerajaan Melayu di Tanah Semenanjung dikuasai Inggeris.

Walaupun kerajaan-kerajaan Melayu sudah terpisah, namun kebudayaan mereka tetaplah mengacu kepada akar budaya yang sama. Di Riau, kerajaan-kerajaan Melayu yang sudah berdiri sendiri, kemudian mengalami beragam perubahan sesuai pula dengan perkembangan zaman dan pengaruh yang masuk. Karena letak geografis Riau bervariasi, maka kontak-kontak dengan pihak luar bervariasi pula, sehingga masyarakat Melayu yang sudah majemuk menjadi semakin majemuk. Itulah sebabnya, di dalam budaya Melayu Riau, terdapat banyak kesamaan dengan budaya daerah lain, termasuk budaya asing yang diserapnya secara bertahap dan dalam proses yang lama. Dari sisi lain, kemajemukan itu disebabkan karena adanya sisa-sisa kepercayaan lama (animis dan dinamisme) dan agama yang pernah ada di Riau seperti Hindu, Budha dan kemudian didominasi oleh agama Islam. Bahkan demikian besarnya pengaruh Islam, sehingga “kemelayuan” seseorang ditentukan oleh: “*beragama Islam, beradat (budaya) Melayu dan berbahasa Melayu*”. Dengan demikian, Islam tidak dapat dipisahkan dari Islam, bagaikan “*mata putih dengan mata hitam*”, dan Islam pun akhirnya menjadi “*jati diri*” kemelayuan dalam arti luas. Itu pula yang menyebabkan seseorang yang bukan Islam kemudian agama Islam disebut “*masuk Melayu*”, dan seorang yang beragama Islam keluar dari Islam disebut “*keluar dari Melayu*”, dan *tanggallah seluruh hak-haknya dalam adat istiadat Melayu.*

Dalam kurun berikutnya masyarakat Melayu menjadi semakin majemuk, terbuka dan kemelayuan seseorang semakin dikekalkan kepada *“kesamaan agama (Islam), kesamaan adat (budaya Melayu) dan kesamaan bahasa (bahasa Melayu), sehingga tidak lagi sepenuhnya mengacu kepada suku dan etnis*. Asas inilah yang terus berkembang, sehingga terwujudlah masyarakat Melayu Riau yang berlatar lakang sejarah dan budaya yang sangat beragam, yang intinya memperkaya khasanah budaya Melayu.

III. FUNGSI KEBUDAYAAN.

Di dalam penjelasan pasal 32 UUD 1945 disebutkan, bahwa:

“Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju kearah kemajuan adab, budaya dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa itu sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia”.

Dari penjelasan di atas kelihatan, bahwa usaha memajukan kebudayaan Bangsa, bertujuan untuk menciptakan suatu kebudayaan yang berfungsi sebagai:

1. *Sarana aktualisasi masyarakat Indonesia yang majemuk sebagai satu bangsa yang besar.*
2. *Kerangka acuan dalam beradaptasi terhadap lingkungan dan pergaulan antar sesama warga negara.*
3. *Pedoman dalam mengembangkan kreativitas kearah pengembangan kebudayaan dinamis demi kejayaan bangsa berdasarkan Pancasila.*

(Prof.Dr.S.Budhisantoso: *“Pembangunan Nasional dan Pengembangan Kebudayaan, 1993*).

Kita juga menyadari, bahwa kebudayaan bangsa sebagai perwujudan kepribadian bangsa yang bercirikan *Bhinneka Tunggal Ika* dan berwawasan luas, *harus diupayakan agar senantiasa menjivai perilaku masyarakat dan pelaksana pembangunan, serta lebih mengentalkan rasa kesetia kawan dan tanggungjawab sosial dan disiplin serta semangat yang tinggi.* Dengan demikian, kebudayaan nasional sebagai puncak-puncak kebudayaan daerah, *mampu berperan dalam menapis masuknya unsur-unsur negatif budaya luar, dan mampu pula menyerap nilai-nilai yang positifnya.* Hal ini terasa semakin penting karena sekarang *“intervensi”* budaya luar semakin deras dan merayap sampai ke sudut-sudut kampung dan rumah masyarakat.

Peluang itu diperbesar dengan kemajuan ilmu dan teknologi, sehingga budaya luar dapat dilihat dan disaksikan melalui berbagai tayangan elektronik, media cetak dan sebagainya.

IV. VISI DAN MISI KEBUDAYAAN

Hakikatnya, visi kebudayaan adalah: *“Terwujudnya kebudayaan dan peradaban Indonesia yang berjiwa Pancasila, maju, dinamis, demokratis sebagai acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang bersatu serta memiliki jati diri yang kukuh di tengah-tengah kehidupan antar bangsa dan tantangan sistem global”*.

Dengan visi ini kebudayaan menjadi tulang punggung kekuatan moral dan *“jati diri”* bangsa dalam menyikapi perubahan zaman, dan dalam mewujudkan cita-cita pembangunan dalam arti yang seluas-luasnya. Dengan *“jati diri”* yang kokoh, diharapkan rancangan dan pelaksanaan pembangunan benar-benar mencerminkan pembangunan yang diwarnai kebudayaan, bernuansa budaya, sebagai kepribadian masyarakatnya.

Dari sisi lain, kebudayaan memiliki misi yang teramat penting, yang hakikatnya adalah:

- 1. Membina kebudayaan bangsa sebagai upaya untuk mencapai kemajuan adab, budaya, persatuan bangsa, memperkaya dan memperkembangkan kebudayaan bangsa serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.*

2. *Mengembangkan kebudayaan bangsa sebagai upaya perluasan,pendalaman, dan peningkatan mutu kebudayaan bangsa.*
3. *Melindungi kebudayaan bangsa sebagai upaya pencegahan danpenanggulangan gejala yang menimbulkan kerusakan atau kemusnahan kebudayaan bangsa.*
4. *Memanfaatkan kebudayaan sebagai upaya penggunaan kebudayaan bangsa untuk kepentingan pendidikan, agama, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan lain-lain.*

Dari misi kebudayaan secara nasional ini kelihatan, bahwa pada butir 4 dijelaskan peranan dan manfaat kebudayaan dalam berbagai bidang pembangunan, terutama pendidikan, agama, ekonomi dan ilmu pengetahuan. Dengan demikian semakin jelas, bahwa kebudayaan amatlah penting untuk menjadi landasan dan pendukung pembangunan dalam arti yang seluas-luasnya.

Selain itu, kita menyadari pula bahwa kebudayaan bangsa perlu dibina dan dikembangkan. Untuk itu diwujudkan melalui **strategi kebudayaan** secara nasional yang hakikatnya diarahkan untuk:

1. *Melakukan penggalian dan penelitian kebudayaan*
2. *Melakukan pemeliharaan dan perlindungan kebudayaan*
3. *Melakukan pengembangan dan pengayaan kebudayaan*

4. *Melakukan penanaman nilai-nilai budaya*
5. *Melakukan penyebarluasan kebudayaan*
6. *Melakukan pemanfaatan kebudayaan*
7. *Melakukan kerjasama kebudayaan*

Dengan strategi kebudayaan di atas, jelas memperlihatkan, bahwa kebudayaan selain “*dibangun*”, dibina dan dikembangkan, juga “*dimanfaatkan*” semaksimal mungkin dalam melaksanakan pembangunan.

V. NILAI-NILAI LUHUR BUDAYA MELAYU

Budaya Melayu Riau memiliki nilai-nilai luhur yang sangat patut dan layak untuk dimanfaatkan dalam menyusun rancangan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan. Nilai-nilai utama itu antara lain:

1. Nilai Keterbukaan:

Sejarah Riau mencatat, bahwa berjayanya kerajaan-kerajaan Melayu masa silam, adalah sebagai buah dari peran kebudayaannya yang terbuka. Melalui keterbukaan itulah berbagai unsur positif budaya luar mereka serap dan cerna, yang kemudian memperkaya khasanah budaya Melayu dan yang terpenting dimanfaatkan untuk meningkatkan kecerdasan, taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya.

Dari keterbukaan itulah berpuncanya kemajuan masyarakatnya, yang secara arif memanfaatkan nilai-nilai budaya tempatan dan budaya luar dalam membangun negerinya. Dari situ pula orang Melayu masa silam dikenal handal dalam membuat perahu layar, membuat alat dan kelengkapan nelayan dan bertani, alat kelengkapan rumah tangga dan upacara adat. Dari keterbukaan itu pula mereka dikenal arif dalam menyusun kebijakan pembangunan, dikenal berjaya dalam dunia perniagaan dan ekonomi dan sebagainya. Dari keterbukaan itu pula mereka mampu mengarungi samudera luas menjalin hubungan dagang dan politik dengan berbilang bangsa. Dari keterbukaan itu pula mereka dikenal bijak dalam menata pemerintahan sehingga kerajaannya tetap berjaya dan berdaulat selama ratusan tahun.

Bila dikaitkan dengan pembangunan, nilai keterbukaan tentulah sangat diperlukan, karena melalui keterbukaan akan dapat dirancang dan dilaksanakan pembangunan yang serasi dengan perkembangan zaman, mampu menyerap kemajuan ilmu dan teknologi serta mampu pula mengikuti tuntutan perkembangan masyarakatnya.

2. Nilai Kemajemukan:

Masyarakat Melayu adalah yang majemuk, yang berpunca dari keterbukaannya, sehingga didatangi oleh berbilang kaum dan sukubangsa. Kemajemukan itu menumbuhkan wawasan yang luas, mengembangkan ilmu pengetahuan, serta memberi peluang bersebatinya beragam nilai budaya masyarakatnya sehingga terwujud pula kebudayaannya yang majemuk. Kebudayaan yang majemuk

adalah kebudayaan yang kaya dengan beragam unsur dan bentuk, dan kaya pula dengan beragam lambang dan nilai-nilai luhurnya.

Kenyataan memang membuktikan, bahwa kebudayaan Melayu adalah kebudayaan yang benar-benar majemuk dan sarat dengan beragam bentuk dan nilai. Itulah sebabnya, di dalam kebudayaan Melayu, terdapat hampir berbagai unsur budaya luar, yang dipadukan kedalam satu perwujudan baru, yakni kebudayaan Melayu.

Dengan mengacu kepada nilai kemajemukan ini, rancangan dan pelaksanaan pembangunan dapat diwujudkan secara dinamis dan penuh alternatif, sehingga masyarakat dapat memberikan pilihan yang tepat sesuai dengan situasi, kondisi dan nilai-nilai budaya yang dianutnya.

3. *Nilai Persebatian Melayu:*

Nilai "*Persebatian Melayu*" hakikatnya adalah nilai "*persatuan dan kesatuan*" yang menjadi asas dari terwujudnya kerukunan hidup antar sesama masyarakat, antar kaum dan suku, dan antar bangsa. Melalui "*persebatian*" inilah dijalin kerjasama antar sesama anggota masyarakat tanpa memandang dari mana asal usulnya.

Untuk melaksanakan pembangunan tentulah sangat diperlukan adanya persatuan dan kesatuan dari semua pihak, agar pembangunan itu tidak terbelengkalai dan dapat dimanfaatkan dengan sebaik dan semaksimal mungkin.

4. *Nilai Tenggang menenggang:*

“*Tenggang menenggang*” hakikatnya adalah nilai “*tenggang rasa*” yang menumbuhkan kelestarian sosial dalam arti luas. Budaya Melayu sejak awal sudah mengekalkan nilai ini sebagai salah satu nilai utama yang diwariskan turun temurun. Melalui “*tenggang menenggang*”, baik antar sesama masyarakat maupun antar suku dan antar bangsa, akan selalu terwujud keserasian hidup. Nilai ini amatlah bermanfaat dalam melaksanakan pembangunan, karena setiap orang menyadari sepenuhnya tahap-tahapan pembangunan, sehingga terhindar dari *pemaksaan kehendak* yang mementingkan pembangunan dalam kawasan tertentu saja. Melalui “*tenggang rasa*”, pelaksanaan pembangunan dapat dirancang menurut skala prioritas yang adil, terarah dan terpadu, serta didukung oleh semua pihak.

5. Nilai Kegotongroyongan:

Di dalam budaya Melayu, “*kegotong royongan*” itu lazimnya disebut “*Betobo*”, “*Besolang*”, “*Bepiari*” dan “*Betayan*”. Ungkapan adat mengatakan: “*berat sama dipikul, ringan sama dijinjing; ke laut sama berbasah, ke darat sama berkering; mendapat sama berlaba, hilang sama merugi; hilang sama dicari, sesat sama diunut; sakit jenguk menjenguk, senang jelang menjelang*”, mengekalkan rasa kegotong royongan di dalam masyarakatnya. Karenanya, tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa nilai yang mencerminkan asas kegotong royongan itu hakikatnya sudah “*mendarah daging*” dalam budaya Melayu. Nilai ini tentulah sangat penting dalam mewujudkan pembangunan, karena dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dimaksud.

Dengan dilandasi oleh nilai kegotong royongan diharapkan pembangunan dapat dilakukan secara baik dan benar, dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

6. Nilai “*Senasib sepenanggungan*”:

Nilai “*Senasib sepenanggungan*” intinya adalah nilai yang mengutamakan kebersamaan, rasa kasih mengasih dan saling bertenggan yang bermuara kepada kegotongroyongan. Dengan tumbuhnya rasa “*senasib sepenanggungan, seaib dan semalu*” atau dikatakan: “*setikar sebantal tidur, sepiring sepinggan makan*” “*seanak sekemanakan, senenek dan semamak, seadat dan sepusaka*” atau dikatakan: “*makan tidak menghabiskan, minum tidak mengeringkan*” akan meningkat pula kesadaran masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan pembangunan di kawasan masing-masing.

Dari nilai ini diharapkan kreativitas masyarakat terus bangkit dan berkembang, sehingga pembangunan tidak semata-mata tergantung kepada pemerintah, tetapi juga menjadi tanggungjawab masyarakatnya.

7. Nilai *Malu*:

Budaya Melayu sangat mengutamakan *rasa malu*. Orangtua-tua mengatakan, “**apabila rasa malu sudah melekat, sebarang kerja beroleh berkat**”. Dari sifat malu inilah terbentuknya kepribadian yang terpuji, yang merasa “*malu berbuat kejahatan, malu berbuat curang, malu menganiaya orang, malu korupsi, malu berbuat maksiat, malu “kenyang seorang”, malu membodohi orang, malu berjanji kosong, malu bersumpah palsu, malu menista, malu mencaci, malu hujat*

menghujat, malu fitnah memfitnah, malu berlaku kasar, malu berbuat semena-mena, malu memaksakan kehendak” dan sebagainya.

Supaya pembangunan dapat terwujud dengan baik dan lancar, tentulah rasa malu perlu dimiliki setiap orang, terutama para pelaku pembangunan itu sendiri. Sedangkan dari sisi lain, diharapkan masyarakatpun turut merasa malu apabila ia berpangku tangan saja tanpa menghiraukan upaya-upaya pembangunan di daerahnya.

8. *Nilai Bertanggungjawab:*

Budaya Melayu mengutamakan rasa “*bertanggungjawab*” yang lazim dituangkan di dalam ungkapan: “*tangan mencencang bahu memikul*”, atau dikatakan: “*adat memimpin tahan berlenjin; adat memerintah tahan bersusah; adat berladang tahan terpenggang; adat berkayuh tahan berpeluh*”; *adat bekerja tahan menderita*” atau dikatakan: “*adat berjanji pantang dimungiri, adat bersumpah pantang dilapah, adat bertugas pantang bermalas, adat bekerja pantang bermanja*”. Untuk merancang dan melaksanakan pembangunan nilai ini amatlah diperlukan, karena dapat menjamin terlaksananya pembangunan secara baik dan benar. Dari sisi lain, nilai ini dapat pula memotivasi masyarakat agar mereka turut merasa bertanggungjawab terhadap pembangunan di daerahnya, dan tidak semata-mata menyerahkannya kepada pemerintah atau pihak lain.

9. *Nilai Adil dan Benar:*

Nilai “*Adil dan Benar*” menjadi sandaran budaya Melayu, yang selalu ditanamkan kepada masyarakatnya. Ungkapan adat mengatakan:

“adat merancang sama ditimbang, adat mufakat sama diingat, adat berunding sama dibanding”, atau dikatakan: *“adat berlaba sama merasa, adat berezeki sama dibagi”*. Nilai ini tentulah bermanfaat di dalam merancang dan *melaksanakan* pembangunan, karena dapat membuat *rancangan pembangunan yang adil dan merata*, serta sesuai menurut ketentuan yang berlaku dan sejalan pula dengan aspirasi masyarakatnya. *Pembangunan yang dilakukan secara adil dan benar tentulah tidak menjurus kepada kepentingan tertentu, dan tidak pula menyebabkan hasil pembangunan dimanfaatkan oleh segelintir orang saja.*

10. Nilai Berani dan Tabah:

Budaya Melayu mengutamakan pula sifat berani dan tabah dalam menghadapi cabaran dan tantangan. Ungkapan adat mengatakan: *“apa tanda melayu sejati, berani hidup berani mati”* atau dikatakan: *“apa tanda melayu bertuah, pertam berani keduanya tabah”* atau dikatakan: *“apa tanda melayu terbilang, berani menempuh bala melintang”*. Nilai ini tentulah sangat diperlukan di dalam melaksanakan pembangunan yang lazimnya selalu menghadapi beragam cabaran dan permasalahan.

11. Nilai Arif dan Bijak:

Kearifan dan kebijakan sangat diperlukan di dalam merancang dan melaksanakan pembangunan, karena melalui kearifan dan kebijakan itulah dapat diwujudkan pembangunan yang tepat guna dan tepat sasaran. Ungkapan adat mengatakan: *“arif menyimak kicau burung, bijak menengok musim beralih, pandai membilang bintang di*

langit, cerdas menghitung muka belakang". Nilai ini dari sisi lain dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap rancangan pembangunan dan dapat pula memotivasi masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan pembangunan di daerahnya.

11. *Nilai Musyawarah dan Mufakat:*

Merancang dan melaksanakan pembangunan tentulah diawali dengan semangat musyawarah dan mufakat, karena melalui kegiatan itulah dapat ditampung aspirasi dari berbagai pihak, kemudian merumuskannya dengan sebaik dan sesempurna mungkin. Melalui musyawarah dan mufakat pula masyarakat dapat dilibatkan secara langsung atau pun tidak, dan melalui musyawarah dan mufakat pula berbagai permasalahan, cabaran dan kendala dapat diatasi.

Di dalam budaya Melayu, nilai musyawarah dan mufakat sudah menjadi tiang persebatian masyarakatnya, sudah menjadi acuan dasar dalam merundingkan rancangan dan gagasan, dan sudah menjadi alat untuk menyatukan pendapat. Hasil musyawarah dan mufakat lazimnya menjadi kesepakatan bersama dan menjadi tanggungjawab bersama pula untuk melaksanakan dan mengamankannya.

Di dalam ungkapan adat dikatakan: "*elok rencana karena bersama, terkabul niat karena mufakat*", atau dikatakan: "*apabila duduk bermusyawarah, beban yang berat terasa mudah*" atau dikatakan: "*apabila kerja hendak bermanfaat, dahulukan dengan duduk mufakat*"; "*apabila kerja hendak semenggah, bawalah umat bermusyawarah*".

Patut digaris bawahi, bahwa perkembangan masyarakat semakin hari semakin *kritis* dalam menyampaikan pendapat dan aspirasinya, yang perlu disimak dan diarifi oleh semua pihak, terutama para perancang dan pelaksana pembangunan. Karenanya, melalui wadah musyawarah dan mufakat inilah diletakkan dasar-dasar kebijakan dan strategi pembangunan di suatu kawasan agar tidak timbul permasalahan yang dapat menjadi kendala pembangunan dimaksud.

12. *Nilai Memanfaatkan Waktu:*

Melaksanakan pembangunan tidak dapat dilakukan tanpa perhitungan waktu yang tepat. Budaya Melayu mengajarkan agar setiap orang disiplin terhadap waktu, menghargai waktu dan harus memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Ungkapan adat mengatakan: "*supaya kerja cepat selesai, jangan sekali bertalaitalait; apabila suka berlengah-lengah, niat tak sampai kerja tak sudah*", atau dikatakan: "*apabila hidup hendak terpancang, masa yang ada jangan dibuang; apabila hidup hendak terpuji, bekerja jangan membuang hari*". Karenanya, nilai ini akan memberi manfaat bila dikaitkan dengan pelaksanaan pembangunan.

13. *Nilai Berpandangan jauh ke depan:*

Merancang dan melaksanakan pembangunan memerlukan wawasan yang luas, serta berpandangan jauh ke depan. Budaya Melayu sejak dahulu mengajarkan agar setiap anggota masyarakatnya haruslah berwawasan luas dan berpandangan jauh ke depan, agar mereka tidak tergilas oleh perkembangan zaman dan tidak terjebak oleh rancangan yang "asal jadi" atau terpaku kepada keperluan "*semusim*". Apabila

nilai ini dapat diterapkan dalam merancang dan melaksanakan pembangunan, tentulah diyakini pembangunan itu akan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakatnya dan dapat diwarisi turun temurun, serta tidak *“ketinggalan zaman”*.

Ungkapan adat mengingatkan: *“supaya kerja memberi manfaat, jangan sekali berpandangan singkat”*, atau dikatakan: *“apabila kerja mau senonoh, layangkan pandangan jauh-jauh”*.

14. Nilai Rajin dan Tekun:

Pembangunan tentulah tidak dapat dilakukan dengan bermalas-malasan, karena akan sangat merugikan semua pihak. Orangtua-tua mengatakan: *“Kalau hidup tak mau lenjin, pertama tekun kedua rajin”* atau dikatakan: *“apa tanda melayu sejati, bekerja tidak separuh hati”*; atau dikatakan: *“apa tanda melayu terbilang bekerja tidak alang kepalang”*. Karenanya, nilai rajin dan tekun ini haruslah dapat dijadikan acuan di dalam melaksanakan pembangunan.

15. Nilai Hemat dan Cermat:

Rancangan dan pelaksanaan pembangunan perlu dilakukan secara teliti, hemat dan cermat, agar dananya tidak bocor, dan hasil pembangunan itu benar-benar bermanfaat dan tidak *“mubazir”*.

Ungkapan adat mengatakan: *“supaya kerja tidak terbuang, hemat berhitung arif membilang”*, atau dikatakan: *“supaya kerja beroleh manfaat, lakukan dengan berhemat cermat”*.

Karenanya, nilai hemat dan cermat yang menjadi nilai budaya Melayu patut dan layak untuk dijadikan acuan dalam merancang dan melaksanakan setiap pembangunan.

16. *Nilai Amanah:*

Budaya Melayu mengutamakan pula nilai **“amanah”**, yakni nilai taat dan setia terhadap sumpah dan janji, dan taat dan setia pula dalam memikul tugas dan tanggungjawab dipercayakan kepadanya.

Ungkapan adat mengatakan: **“apabila taat memegang amanah, tegaklah tuah berdiri marwah”** atau dikatakan: **“tanda orang berbudi pekerti, taat memegang amanah dan janji”** atau dikatakan: **“apabila kerja hendak semenggah, jangan sekali melanggar amanah”**.

Karenanya, nilai ini haruslah dimanfaatkan di dalam merancang dan melaksanakan pembangunan, agar benar-benar dapat mewujudkan pembangunan sesuai dengan harapan semua pihak.

17. *Nilai Ilmu Pengetahuan:*

Budaya Melayu menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan teknologi, dan memuliakan orang yang memiliki pengetahuan luas. Orangtua-tua mengatakan: **“supaya kerja tidak terbengkalai, bekerja jangan memandai-mandai; supaya kerja membawa faedah, bekerja jangan mengada-ada”** atau dikatakan: **“supaya tidak mendapat malu, duduk bertanya tegak berguru”** Karenanya, nilai ini patut dan layak untuk dijadikan acuan di dalam merancang dan melaksanakan pembangunan, agar pembangunan itu benar-benar terwujud dengan sebaik-baiknya. Dari sisi lain, nilai ini dapat pula menghindarkan perancang dan pelaksana pembangunan dari perbuatan **“asal jadi”** atau **“asal-asalan”** saja, atau mempercayakan rancangan dan pelaksana pemabngunan

kepada orang yang bebal dan tidak berpengetahuan dibidang yang diperlukan oleh pembangunan dimaksud.

18. *Nilai Taqwa Kepada Allah:*

Budaya Melayu adalah budaya yang sumber dan acuannya "*bersebat*" dengan ajaran agama Islam. Karenanya, Islam tidak dapat dipisahkan dari kemelayuan, bahkan dianggap sebagai "*jati diri kemelayuan*" seseorang. Acuan ini pula yang menyebabkan munculnya pendapat yang mengatakan: "*bahwa yang disebut orang Melayu adalah "beragama Islam, beradat (budaya) Melayu dan berbahasa Melayu"*". Itulah sebabnya orang yang *bukan Islam* kemudian menganut agama Islam disebut "*masuk Melayu*", dan sebaliknya bila seorang Melayu *keluar dari agama Islam* maka ia disebut "*keluar dari Melayu*" dan tanggallah seluruh haknya baik menurut syarak maupun adat istiadat Melayu.

Nilai ini jelaslah amat diperlukan, karena dari nilai inilah berpuncanya nilai-nilai luhur budaya Melayu. Di dalam nilai inilah berhimpun keimanan dan ketaqwaan kepada Allah, yang menjadi tiang keberibadian setiap insan Melayu. Karenanya, apabila perancang dan pelaksana pembangunan berlandaskan kepada nilai ini dapat dipastikan bahwa pembangunan dimaksud akan berjalan dengan lancar, tepat sasaran dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dan dapat pula dipastikan, bahwa pelaksanaannya akan benar-benar menurut alur dan patutnya, dan aman dari kebocoran dan sebagainya.

19. *Nilai – nilai lainnya:*

Selain dari nilai-nilai utama di atas, budaya Melayu masih banyak memiliki khasanah nilai luhur yang mereka warisi turun temurun, seperti nilai *“kemandirian”*, nilai *“tahu diri”*, nilai *“rendah hati”*, nilai *“rela berkorban”*, nilai *“pemurah”*, nilai *“sabar dan lapang dada”*, nilai *“suka mengalah”* dan *“tidak serakah”* dan sebagainya. Kesemua nilai hakiki ini tentulah dapat memberikan dukungan dalam merancang dan melaksanakan pembangunan.

Contoh-contoh nilai luhur budaya Melayu yang disebutkan di atas, tentulah patut disimak, dicerna dan dihayati oleh setiap orang, terutama para perancang dan pelaksana pembangunan. Dengan demikian pembangunan, apapun bentuk dan perwujudannya, akan didukung oleh semua pihak, dan akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya pula kepada masyarakat, bangsa dan negara.

VI. KHASANAH BUDAYA MELAYU

Selain dari memiliki *nilai-nilai luhur* seperti diuraikan di atas, budaya Melayu sarat pula dengan beragam perwujudan dan lambang-lambang, yang direka dalam berbagai bentuk, seperti *“Seni Bina”*, *“Adat istiadat dan tradisi”*, *“kesenian”* dan sebagainya. Kesemuanya itu menjadi khasanah budaya Melayu yang tiada ternilai, yang tumbuh dan berkembang selama ratusan tahun serta diwarisi dari generasi ke generasi.

1. “*Seni Bina Melayu*”

Budaya Melayu memiliki keberagaman “*Seni Bina*” (*Seni Bangunan atau Arsitektur Tradisional*), berupa bangunan *rumah kediaman, balai pertemuan, rumah ibadah, istana para sultan*, dan sebagainya. Bentuk-bentuk bangunan ini kaya dengan ragam bentuk dan ragam hias, yang mencerminkan kepribadian Melayu.

Dengan mengacu kepada bentuk-bentuk bangunan itu tentulah dapat dirancang dan dibangun berbagai bangunan yang bernuansa atau memiliki warna dan ruh kemelayuan. Dari bentuk bangunan nantinya akan dikembangkan “*seni bina*” Melayu dalam arti luas, apalagi bila dirancang dengan memadukan bentuk-bentuk tradisional dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Dari bentuk tradisional itu akan dapat dibangun perumahan rakyat atau perumahan sederhana yang sesuai dengan budaya serta adat dan tradisi tempatan. Dari perwujudan “*seni bina*” tradisional itu dapat pula dibangun perkantoran, pertokoan, dan sebagainya yang kesemuanya tetap mengacu dan menampilkan jiwa kemelayuannya. Dengan demikian, pembangunan rumah, toko dan gedung-gedung tetap diwarnai oleh budaya Melayu sebagai “*jati dirinya*”.

Apabila hal itu terwujud tentulah akan menumbuhkan kebanggaan bagi masyarakatnya.

2. “*Adat Istiadat Melayu*”

Perwujudan lain dari kebudayaan Melayu adalah *adat dan tradisi* tempatan yang lazim disebut “*adat resam*” yang sarat dengan nilai-nilai

ludur, yang selalu dijadikan acuan oleh masyarakat pendukungnya. Dengan mengacu kepada adat dan tradisi Melayu, diharapkan rancangan dan pelaksanaan pembangunan dapat dibuat dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Acuan ini diharapkan dapat melahirkan rancangan dan pelaksanaan pembangunan yang *“lurus”*, *“bersih”*, dan tidak menimbulkan permasalahan moral bagi masyarakatnya. Dengan demikian tentulah diharapkan tidak akan ada rancangan pembangunan yang cenderung memberi peluang berkembangnya perbuatan *“maksiat”* atau yang melanggar *“pantang larang”* dan norma-norma sosial masyarakat tempatan. Hal ini dirasakan sangat penting, karena tidak mustahil di dalam merancang pembangunan jangka panjang, akan terjadi berbagai permasalahan mengenai *krisis moral, ekstasi, prostitusi, perjudian, narkoba, minuman keras* dan sebagainya, yang tentu akan membawa keresahan dan tindakan kejahatan.

Bahkan, *sekarang pun sudah sangat banyak tempat atau kawasan yang dijadikan tempat maksiat secara liar, yang sudah pula banyak menimbulkan dampak negatif terhadap akhlak dan kerukunan hidup masyarakat daerah ini.* Karenanya, dalam merancang dan melaksanakan pembangunan daerah ini, sangat perlu diperhatikan adat dan tradisi masyarakatnya agar dapat mengantisipasi dan mengikis sumber-sumber kemaksiatan dan kejahatan dimaksud. Sebab kelalaian dari semua pihak akan semakin memperburuk keadaan, dan semakin mengembang biakkan perilaku yang buruk dan merusak masyarakat itu.

Kita menyadari bahwa kawasan ini adalah kawasan yang jumlah penduduk pendatang dengan penduduk asal nyaris berimbang, bahkan di beberapa kawasan lebih banyak jumlah pendatang dari masyarakat tempatan. Kenyataan ini haruslah diarifi di dalam merancang dan melaksanakan pembangunan, agar *nilai-nilai adat dan tradisi atau budaya tempatan tetap dominan dan mewarnai pembangunan dimaksud*. Kita percaya, bahwa para pendatang menyadari pula sejauh mana keberadaan mereka di kawasan ini, dan sejauh mana pula dapat berpartisipasi dalam membangun kawasan ini sebagai tempatnya mencari nafkah dan usaha. Kita pun percaya, bahwa para pendatang, terutama yang menetap dan akan tetap menetap di sini, menganggap daerah ini sebagai daerahnya sendiri yang harus dibangun, dikembangkan dan dipelihara kerukunan, keamanan, ketertiban dan kesejahteraannya. Mereka pun tentu memahami pula bahwa daerah ini memiliki budaya, memiliki adat istiadat dan tradisi yang harus dihormati dan bahkan dicerna serta dihayatinya agar benar-benar *“bersehati”* dengan masyarakat tempatan. Dengan merujuk kepada ungkapan: “di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung; di mana ranting dipatah di situ air disauk” tentulah para pendatang akan *“arif membawa diri”* dan *“bijaksana menempatkan dirinya”*. Kearifan dan kebijaksanaan itulah yang akan mengekalkan kerukunan antar semua kelompok masyarakat, serta mewujudkan kesejahteraan bagi semua pihak.

Dari sisi lain adat Melayu kawasan ini mengenal secara pasti mengenai adanya *hak-hak adat* terhadap *“hutan dan tanah”* yang lazim disebut *“Hutan Tanah Wilayah”*. Karenanya, di dalam

merancang dan melaksanakan pembangunan *keberadaan hak-hak adat ini haruslah diperhatikan dan dihormati, dan dirancang bagaimana memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat yang menguasai kawasan itu.*

Adat Melayu mengatur pula beragam adat mengenai *penguasaan, pemeliharaan dan pemanfaatan hutan tanah dan lingkungannya, yang bermanfaat bagi mengekalkan pelestarian alam dan lingkungan.* Bahkan tidaklah berlebihan bila dikatakan, bahwa jauh sebelum negara mengatur dan mengeluarkan peraturan atau UU tentang pelestarian alam dan lingkungan, konsep dasarnya sudah ada di dalam masyarakat daerah ini, yang dipaterikan di dalam adat dan tradisinya. Ketentuan adat itulah yang menyebabkan mereka mampu memelihara hutan tanah dan lingkungannya selama ratusan tahun, yang sekarang diluluh lantakkan oleh pembangunan yang tidak memperdulikan lingkungan dan alam sekitar.

Dari sisi yang lain lagi kita melihat, bahwa budaya daerah ini adalah budaya *“bertani”* dan *“menangkap ikan”* secara tradisional. Namun sampai saat ini, baik bertani maupun menangkap ikan belumlah benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya karena berbagai keterbatasan, baik ilmu pengetahuan, permodalan, maupun rancangan yang tepat guna. Karenanya, di dalam merancang dan melaksanakan pembangunan faktor ini hendaklah diperhatikan, agar masyarakat dapat memanfaatkannya sesuai dengan serba keterbatasan dan serba kekurangan dimaksud.

Kita juga melihat, bahwa masyarakat daerah ini memiliki budaya yang “*terikat kepada kampung halamannya*”, sehingga mobilitas penduduk relatif rendah dan terbatas. Karenanya, rancangan pemindahan penduduk dari satu lokasi ke lokasi lain (transmigrasi lokal, pemukiman baru dll) perlu dipertimbangkan secara masak agar tidak menjadi mubazir atau diperjual belikan oleh orang yang mendapatkannya. Budaya ini pula yang dahulu banyak di antara penduduk kawasan ini menolak dijadikan transmigrasi lokal atau menolak untuk meninggalkan kampungnya ketika mereka diberi peluang mendapatkan lahan dan kebun sawit melalui pola PIR trans lokal. Barulah sekarang kesadaran itu tumbuh, sepanjang “*jatah*” mereka sebagian besar sudah dijual atau berpindah tangan ke pihak lain.

Kita juga melihat karena relatif rendahnya mobilitas penduduk tempatan, menyebabkan banyak kawasan baru yang dibuka tidak dapat mereka manfaatkan, termasuk pembukaan jalan0jalan utama yang memiliki potensi ekonomi tinggi. Itulah sebabnya, hampir di semua ruas jalan baru kebanyakan dimanfaatkan dan dikuasai oleh pihak pendatang, sedangkan masyarakat tempatan tetaplah “*terpuruk*” di kampung halamannya yang kian sepi. Karenanya, di dalam merancang dan melaksanakan *pembangunan jalan-jalan baru* atau *kawasan baru*, hendaklah dirancang kebijakan yang dapat membantu masyarakat tempatan, mengamankannya dari pihak luar agar mereka tidak leluasa dan semena-mena memanfaatkannya, apalagi sampai menguasai lahan yang luas tanpa memikirkan masyarakat tempatan. Dan akan lebih berbahaya lagi, bila kawasan itu dijadikan tempat maksiat atau tempat yang tidak sesuai dengan budaya masyarakat tempatan serta kebijakan pemerintah dalam arti luas.

3. *Kesenian Daerah:*

Unsur kesenian daerah dapat pula dimanfaatkan di dalam melaksanakan pembangunan, karena kesenian lazimnya akrab dengan masyarakat pendukungnya dan kaya pula dengan beragam variasi dan nilai. *Kesenian dapat dimanfaatkan dalam memotivasi masyarakat agar mereka mau melibatkan diri dalam melaksanakan pembangunan, dapat dimanfaatkan dalam menyebarluaskan program pembangunan, dapat dimanfaatkan dalam mewujudkan kerukunan hidup antar sesama anggota masyarakat, dapat dimanfaatkan dalam mewarnai bentuk pembangunan* dan sebagainya.

VII. SIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan antara lain:

1. *Bahwa Kebudayaan memiliki nilai-nilai luhur dan beragam perwujudan unsur-unsurnya, yang menjadi "jati diri" masyarakat pendukung kebudayaan dimaksud. Nilai-nilai luhur dan perwujudan budaya itu amatlah bermanfaat bila dijadikan landasan dan acuan di dalam menyusun rancangan pembangunan, dan bermanfaat pula di dalam pelaksanaan pembangunan dalam arti luas.*
2. *Bahwa kebudayaan hakikatnya memegang peranan penting dalam penyusunan rancangan pembangunan dan berperan penting pula di dalam melaksanakan pembangunan, karena kebudayaan dapat*

mewarnai pembangunan, dan dapat pula memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi di dalam semua kegiatan pembangunan.

3. *Bahwa dengan meningkatkan peranan kebudayaan di dalam merancang dan melaksanakan pembangunan, diharapkan mampu pula meningkatkan dan mengentalkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat, mengentalkan hubungan antar sesama anggota dan kelompok masyarakat, sehingga apapun rancangan dan wujud pembangunan akan didukung sepenuhnya oleh semua pihak.*
4. *Bahwa dengan memanfaatkan beragam unsur dan perwujudan kebudayaan dapat menjadikan pembangunan yang bernuansa budaya tempatan, mewarnai pembangunan dan mengekalkan nilai-nilai luhur budaya masyarakatnya.*
5. *Bahwa pembangunan yang berbudaya, selain menumbuh kembangkan simpati dan partisipasi masyarakat dan memudahkan untuk menyerap aspirasi masyarakat, terntulah akan menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat luas untuk turut memikul beban pembangunan dimaksud.*
6. *Bahwa pembangunan yang mengacu kepada kebudayaan, diyakini akan mengekalkan "jati diri" masyarakatnya dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada seluruh lapisan masyarakat.*

VIII. PENUTUP

Apa yang disajikan di atas hakikatnya memberikan informasi mengenai *manfaat pembangunan yang berwawasan budaya daerah*, sehingga pembangunan dimaksud benar-benar tepat guna dan memberi manfaat kepada seluruh rakyat. Kita menyadari pula bahwa selama ini pembangunan seakan "*mengabaikan*" kebudayaan, sehingga terjadilah beragam kejanggalan, kebocoran, kendala, bahkan ada yang menyebabkan pembangunan yang menelan biaya yang relatif besar itu menjadi "*mubazir*" atau *mendekati kemubaziran*.

Padahal, dalam kondisi pendanaan yang terbatas, serta kondisi perekonomian rakyat yang terpuruk, rancangan dan pelaksanaan pembangunan haruslah dilakukan dengan teliti, hemat dan cermat, serta tepat guna dan tepat sasaran.

Kita juga tidak ingin terjadinya hal-hal yang menyebabkan pembangunan menjadi tergendala atau sekedar dibangun "*asal jadi*" saja, tetapi haruslah dilakukan dengan penuh kesungguhan serta melibatkan semua lapisan masyarakat. *Dengan mengacu kepada budaya daerah, dengan melibatkan masyarakat di dalam merancang dan melaksanakan pembangunan, tentulah diyakini hasilnya lebih memuaskan.*

Kita juga mengharapkan, dengan adanya *pembangunan yang berwawasan budaya*, kebudayaan itu sendiri turut terangkat dan semakin berkembang, sehingga nilai-nilai luhurnya dapat tetap berkekal dan

mampu menjadi "*jati diri*" masyarakat pendukungnya. Dan masyarakat yang berbudaya, tentulah menjadi masyarakat yang penuh kreativitas, dinamis, berwawasan luas, jujur dan berkepribadian terpuji, bertanggungjawab, tahu diri dan sebagainya. Dengan demikian, ***pembangunan tidak hanya sekedar menyentuh sisi fisiknya, tetapi juga membangun kebudayaan itu sendiri, yang bermakna membangun moral dan akhlak serta kepribadian masyarakatnya.***

Kepada pihak penyelenggara pertemuan ini disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan, semoga kegiatan ini membawa hasil yang memuaskan bagi kita semua, serta bermanfaat bagi kehidupan masyarakat daerah ini dimasa mendatang.

Pekaribaru, Juni 2000.